

SURAT KEPUTUSAN PENGAWAS, KEPALA DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

tentang :

Pembentukan Panitia Pembelian Obat-2an anti malaria
untuk Dinas U.P.M. Direktorat P.4.M.DIY.

No. : 8287/III.P.4.M.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. no. 17 Tahun 1974.
2. Surat keputusan Menteri Kesehatan R.I. tgl.10 April 1974
no.3738/Biro IV/02/Perbum/74;
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan R.I. tgl. 23 Oktober 1972
no.595/X-AU/B.IV-03/1972;
4. Surat Menteri Kesehatan R.I. tgl.30 Juli 1974 no.159/VII/
Kab.BKH/74;
- Menimbang : Bahwa perlu dibentuk Panitia Pembelian Obat-2an anti malaria
untuk Dinas U.P.M.Direktorat P.4.M.DIY, seperti yang tercantum
didalam D.I.P. Proyek Pemberantasan Penyakit Menular DIY
nomer 108/XXIV/5/74 tgl. 16 Mei 1974;

MEMUTUSKAN :

Pertama: Membentuk Panitia Pembelian Obat-2an anti malaria untuk Di -
nas U.P.M.Direktorat P.4.M. D.I.Y. dengan susunan personalia
nya sbb:

1. Drs. Soegijo Sapotro B.Sc. - Kepala Direktorat P4M.DIY
sebagai Ketua.
2. Sdr. Ny. Soewartinah - Kepala Urusan Tata-Usaha Dit.
P4M.DIY sebagai Sekretaris.
3. " Ny. Suharti - Bendaharawan Dit.P4M.DIY
sebagai Bendaharawan.
4. " Djumali B.Sc. - Kepala Dinas U.P.M.Dit.P4M.DIY
sebagai anggota.
5. " S.Hardjono - Kepala Sub Bagian II.Dit.P4M.
DIY sebagai anggota.

Kedua : Panitia Pembelian Obat-2an seperti tersebut kalimat pertama
bertugas untuk melaksanakan pembelian obat-2an anti malaria
untuk Dinas U.P.M. seperti yang tercantum didalam D.I.P. Pro-
yek Pemberantasan Penyakit Menular D.I.Y. no.108/XXIV/5/74
tgl.16 Mei 1974; sesuai dengan peraturan2 yang berlaku untuk
ini.

Ketiga : Didalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembelian harus ber-
pegangan pada peraturan/ketentuan-2 yang berlaku.

Dengan ketentuan, bilamana terdapat kekeliruan didalam keputusan
ini, akan diadakan peninjauan dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.

Yogyakarta, 18 September 1974.

Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan
Daerah Istimewa Yogyakarta,

(dr. R.Suhardi)/

Surat keputusan ini disampaikan
kepada Yth:

1. Badan Pengawas Keuangan Negara di Jakarta.
2. Bappenas di Jakarta.
3. Dit. Jen. Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta.
4. Departemen Kesehatan R.I. di Jakarta.
5. Bagian Pengawasan Keuangan Dep. Kes. R.I. di Jakarta.
6. Bagian Keuangan Departemen Kesehatan R.I. di Jakarta.
7. Direktorat Jendral P.4.M. Dep. Kes. R.I. di Jakarta.
8. Kantor Bendahara Negara di Yogyakarta.
9. Gubernur/Kepala Daerah D.I.Y. di Yogyakarta.
10. Kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan
dijalankan sebagaimana mestinya.
11. A r s i p .